

jogja



Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS
2023-2026

**BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET**

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦺꦒꦺꦭꦺꦏꦸꦁꦁꦢꦤꦲꦱꦺꦠꦶꦪꦲꦏꦿꦠꦶ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telpun (0274) 561515 Ext. 1117-1122 Faximile (0274) 564544

YOGYAKARTA – Kode Pos 55213

website: bpka.jogjaprov.go.id

e-mail: bpka@jogjaprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2023 - 2026

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah yang dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Gubernur yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah

Daerah tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat (RENSTRA PD) Provinsi tahun 2023-2026);

- c. bahwa menindaklanjuti Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu mengubah Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 pada Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021;
- d. bahwa agar penyusunan Rencana Strategis BPKA DIY Tahun 2023 – 2026 dapat berjalan secara efektif dan efisien perlu dibentuk Tim;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKA DIY tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis BPKA DIY Tahun 2017 – 2022;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset;
17. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 050/0110 tentang Penyusunan Rancangan RENSTRA PD Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 dengan susunan personalia sebagai berikut :

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I	Pengarah	Wiyos Santoso, SE, M.Acc	Kepala BPKA DIY
II	Ketua	Lindi Dewi Kartika, SE	Kepala Bidang Anggaran Belanja
III	Sekretaris	Erma Umayah, SE, MM	Kepala Bidang Akuntansi
IV	Anggota	1. Gamal Suwantoro, SH	Kepala Bidang Anggaran Pendapatan
		2. Endrawati Utami, SE, M.Acc	Kepala Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah
		3. Adi Nugroho, SE	Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah
		4. Chrestina Erni Widyastuti, SE, M.Si	Kepala Bidang Pengelola Kas Daerah
		5. Hidayati Yulianstri Djohar, S.Sos. M.Si	Kepala Subbidang Anggaran Belanja Perekonomian
		6. Khaira Ummatien, SE.Ak, M.Si	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
		7. Iwan Sutardi Budi Santoso, ST, M.Eng	Kepala Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan
		8. Rachma Tyasari SE, Mec.Dev	Kepala Subbidang Bina Administrasi Badan Usaha Milik Daerah

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
9.		Warih Budiyo Setyawan, S.Sos, MT	Kepala Subbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
10.		Yudi Kristianto, ST	Kepala Subbidang Pajak Daerah
11.		Suryanto, SIP	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
12.		Ari Widiastuti, SS	Perencana Ahli Muda
13.		Putra Djumastida, SE	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas menyusun Rencana Strategis BPKA DIY Tahun 2023-2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal Januari 2022
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta



WIYOS SANTOSO, SE, M.Acc
NIP. 19680215 199403 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦺꦒꦺꦭꦺꦏꦸꦁꦁꦤ꧀ꦢꦤꦲꦱꦺꦠꦏꦺꦴꦁꦁꦤ꧀ꦢꦤꦲꦱꦺꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telpun (0274) 561515 Ext. 1117-1122 Faximile (0274) 564544

YOGYAKARTA – Kode Pos 55213

website: bpka.jogjaprov.go.id

e-mail: bpka@jogjaprov.go.id

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2023 - 2026

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah yang dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Gubernur yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan

Menengah Daerah tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat (RENSTRA PD) Provinsi tahun 2023-2026);

- c. bahwa menindaklanjuti Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu mengubah Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 pada Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021;
- d. bahwa agar penyusunan Rencana Strategis BPKA DIY Tahun 2023 – 2026 dapat berjalan secara efektif dan efisien perlu dibentuk Tim;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKA DIY tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis BPKA DIY Tahun 2017 – 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset;
17. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 050/0110 tentang Penyusunan Rancangan RENSTRA PD Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 dengan susunan personalia sebagai berikut :

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I	Pengarah	Wiyos Santoso, SE, M.Acc	Kepala BPKA DIY
II	Ketua	Maria Damayanti Handayani, SE.Ak, M.Acc	Sekretaris
III	Sekretaris	Lindi Dewi Kartika, SE	Kepala Bidang Anggaran Belanja
IV	Anggota	1. Gamal Suwanto, SH	Kepala Bidang Anggaran Pendapatan
		2. Endrawati Utami, SE, M.Acc	Kepala Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah
		3. Adi Nugroho, SE	Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah
		4. Chrestina Erni Widyastuti, SE, M.Si	Kepala Bidang Pengelola Kas Daerah
		5. Erma Umayah, SE, MM	Kepala Bidang Akuntansi
		6. Hidayati Yuliantri Djohar, S.Sos. M.Si	Kepala Subbidang Anggaran Belanja Perekonomian
		7. Khaira Ummatien, SE.Ak, M.Si	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
		8. Iwan Sutardi Budi Santoso, ST, M.Eng	Kepala Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan
		9. Rachma Tyasari SE, Mec.Dev	Kepala Subbidang Bina Administrasi Badan Usaha Milik Daerah

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
10.		Warih Budiyo Setyawan, S.Sos, MT	Kepala Subbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
11.		Yudi Kristianto, ST	Kepala Subbidang Pajak Daerah
12.		Suryanto, SIP	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
13.		Ari Widiastuti, SS	Perencana Ahli Muda
14.		Putra Djumastida, SE	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas menyusun Rencana Strategis BPKA DIY Tahun 2023-2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal Februari 2022
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta



WIYOS SANTOSO, SE, M.Acc
NIP. 19680215 199403 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (BPKA DIY) dapat tersusun. Rencana Strategis (RENSTRA) pada Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode empat tahunan. Dokumen RENSTRA tersebut telah ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

RENSTRA BPKA DIY memuat beberapa runtutan substansi diantaranya Pendahuluan, Gambaran Pelayanan SKPD, Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan Pembangunan BPKA DIY, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif, Indikator Kinerja BPKA DIY yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD DIY, serta Penutup. RENSTRA yang sudah disusun akan menjadi sistem kendali di dalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 4 (empat) tahun yang diturunkan di dalam Rencana Kerja (Renja).

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan RENSTRA BPKA DIY. Semoga dokumen RENSTRA BPKA DIY yang sudah tersusun dapat mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKA DIY dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Yogyakarta, Maret 2022

Kepala BPKA DIY



WIYOS SANTOSO, SE, M.Acc.
NIP. 19680215 199403 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	5
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	5
2.2. Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	6
2.3. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	9
2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	28
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran.....	28
3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA.....	30
3.4. Telaahan Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	30
3.5. Penentuan Isu Strategis	30
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	32
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	34
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	36
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
BAB VIII. PENUTUP.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai BPKA DIY berdasarkan tingkat pendidikan	10
Tabel 2. Sarana-Prasarana di BPKA dan KPPD Kabupaten/Kota di DIY	12
Tabel 3. Pencapaian Kinerja Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	15
Tabel 4. Anggaran Pendapatan BPKA DIY Tahun 2018 – 2020	18
Tabel 5. Realisasi Pendapatan BPKA DIY Tahun 2018 – 2020	19
Tabel 6. Anggaran Belanja BPKA DIY Tahun 2018– 2020	20
Tabel 7. Realisasi Belanja BPKA DIY Tahun 2018– 2020	21
Tabel 8. Anggaran Pendapatan BPKA DIY Tahun 2021 - 2022.....	22
Tabel 9. Anggaran Belanja BPKA DIY Tahun 2018– 2020	23
Tabel 104. Tujuan, indikator tujuan/sasaran BPKA DIY tahun 2023-2026	33
Tabel 118. Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Tahun 2023 – 2026	38
Tabel 12. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang Mengacu pada RPD 2023-2026	63
Tabel 15. Pernyataan Strategi dan Kebijakan.....	34
Tabel 16. Program Pemda dan Indikator Program Pemda tahun 2023 – 2026.....	36
Tabel 17. Program dan Indikator Program BPKA DIY tahun 2023 – 2026.....	37
Tabel 18. Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Tahun 2023 – 2026 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar1. Struktur Organisasi BPKA DIY	8
Gambar 2. Struktur Organisasi UPT (KPPD DIY)	9
Gambar3. Grafik Pejabat Struktural Berdasarkan jenis kelamin	10
Gambar 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	11

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RENSTRA perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Fungsi RENSTRA Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah yang dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Gubernur yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 mengamanatkan Pemerintah Daerah agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis PD (RENSTRA PD) Provinsi tahun 2023-2026. Selanjutnya seluruh Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemda DY termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (BPKA DIY) berkewajiban menyusun RENSTRA sebagai pedoman pelaksanaan tugas fungsi. RENSTRA BPKA DIY yang telah disusun dijadikan pedoman pelaksanaan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Penyusunan RENSTRA BPKA DIY dilakukan melalui beberapa langkah perencanaan dan dirumuskan melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur dan unit kerja di lingkungan BPKA DIY. Dengan tersusunnya dokumen RENSTRA BPKA DIY, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman bagi seluruh unit kerja dalam lingkup koordinasi BPKA DIY, mitra kerja, para pemangku kepentingan, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. RENSTRA yang disusun berisi antara lain:

1. Arah kebijakan dan strategi BPKA DIY dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.

3. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
4. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pendaanaan indikatif berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur.

Selanjutnya dokumen RENSTRA ini akan diterjemahkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan setiap tahun yang memuat program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan. RENSTRA bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting. Di samping itu, rencana strategis merupakan salah satu upaya BPKA DIY membangun suatu sistem pengelolaan keuangan dan aset yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran, serta indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKA DIY.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
9. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

1.3. Maksud dan Tujuan

RENSTRA BPKA DIY tahun 2023-2026 disusun sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta BPKA DIY setiap tahunnya serta sebagai pedoman bagi seluruh personil di BPKA DIY dalam rangkamencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk empat tahun mendatang.

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA BPKA DIY tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta kerangka pendanaannya dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RENSTRA tahun 2023 - 2026;
- b. Menyediakan tolok ukur capaian kinerja dalam pelaksanaan program pembangunan;
- c. Sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan;
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja BPKA DIY selama 4 (empat) tahun periode RENSTRA.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis BPKA DIY adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Perubahan Renstra.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN BPKA DIY

Pada bab ini berisi informasi tentang peran (tugas dan fungsi) BPKA DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki BPKA DIY dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra BPKA DIY periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas BPKA DIY yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra BPKA DIY ini.

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bab ini berisi mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi BPKA DIY, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKA DIY

Bab V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan BPKA DIY dalam lima tahun mendatang.

Bab VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok, sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja BPKA DIY yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII. PENUTUP

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 6 (enam) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pada tahun 2021 ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang di dalamnya terdapat beberapa perubahan nomenklatur subbidang, jabatan dan tugas fungsi bidang sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Badan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi, dan pembinaan administrasi keuangan daerah, serta barang milik daerah;
- c. pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain, serta pendapatan transfer;
- d. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. pengelolaan kas daerah dan akuntansi;
- h. pengelolaan barang milik daerah;
- i. pelaksanaan dan tuntutan ganti rugi;
- j. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
- k. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- n. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan/atau pengawasan urusan pemerintahan

- bidang keuangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- o. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
 - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Adapun tugas fungsi KPPD DIY yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Nomor 100 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada BPKA DIY yaitu mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah untuk menaikkan penerimaan Pajak Daerah Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada KPPD DIY mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY;
- b. pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- c. pelaksanaan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- d. pelaksanaan pelaporan dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- e. penyiapan bahan kebijakan penyelesaian sengketa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- f. pengendalian operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

2.2. Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

BPKA DIY berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh Kepala Badan.

Susunan Organisasi Badan, terdiri dari:

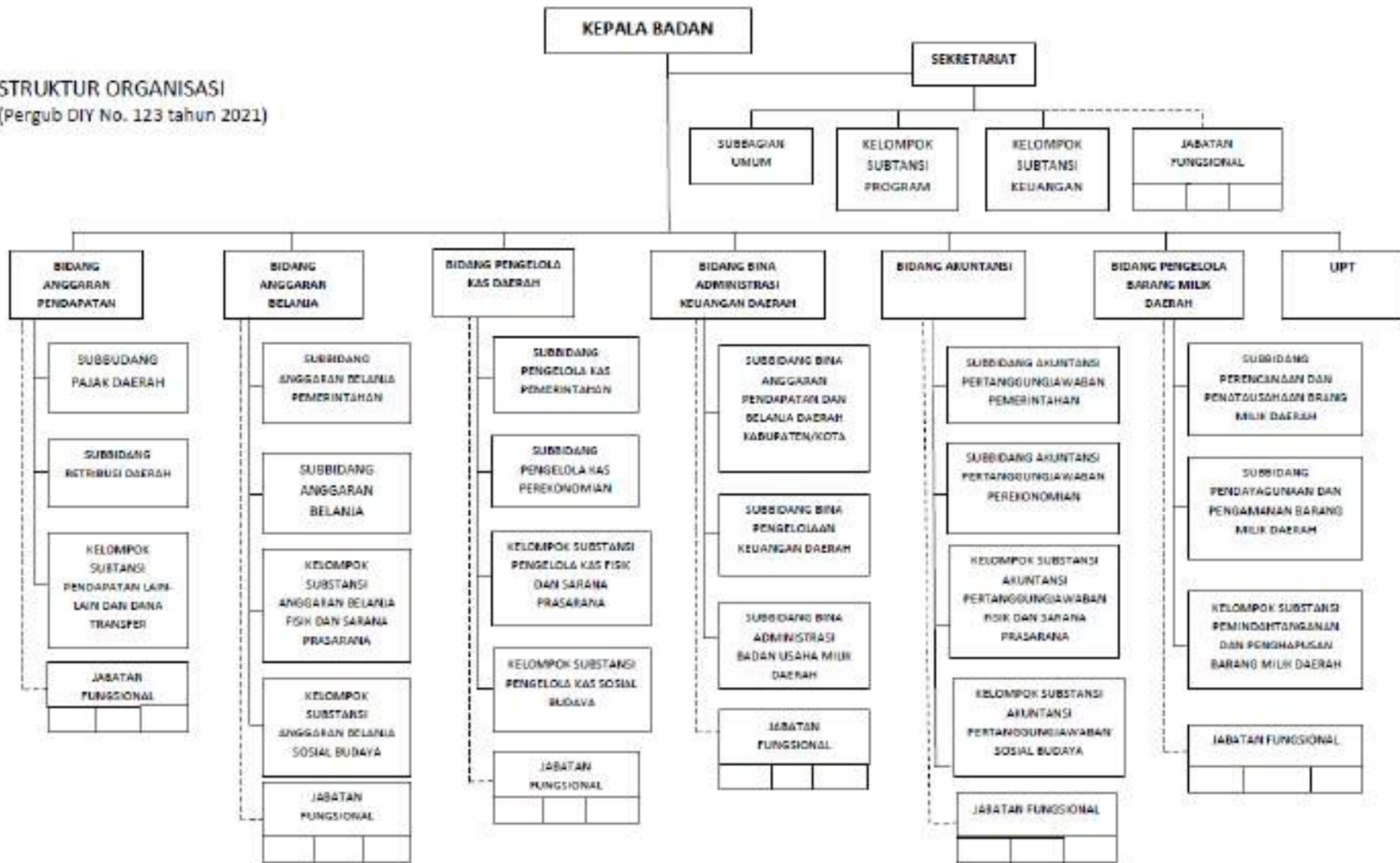
- 1. Kepala Badan;**
- 2. Sekretariat, terdiri atas** Subbagian Umum, Kelompok Substansi Program dan Kelompok Substansi Keuangan.

3. **Bidang Anggaran Pendapatan, terdiri atas :** Subbidang Pajak Daerah, Subbidang Retribusi Daerah dan Kelompok Substansi Pendapatan Lain-lain dan Dana Transfer.
4. **Bidang Anggaran Belanja, terdiri dari:** Subbidang Anggaran Belanja Pemerintahan, Subbidang Anggaran Belanja Perekonomian, Kelompok Substansi Anggaran Belanja Fisik dan Sarana Prasarana serta Kelompok Substansi Anggaran Belanja Sosial Budaya.
5. **Bidang Pengelola Kas Daerah, terdiri dari:** Subbidang Pengelola Kas Pemerintahan, Subbidang Pengelola Kas Perekonomian, Kelompok Substansi Pengelola Kas Fisik dan Sarana Prasarana serta Kelompok Substansi Pengelola Kas Sosial Budaya.
6. **Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah, terdiri dari:** Subbidang Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Subbidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah dan Subbidang Bina Administrasi Badan Usaha Milik Daerah.
7. **Bidang Akuntansi, terdiri dari:** Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan, Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian, Kelompok Substansi Akuntansi Pertanggungjawaban Fisik dan Sarana Prasarana serta Kelompok Substansi Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Budaya.
8. **Bidang Pengelola Barang Milik Daerah, terdiri dari:** Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah, Subbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah serta Kelompok Substansi Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
9. **Unit Pelaksana Teknis; dan**
10. **Jabatan Fungsional.**

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar1. Struktur Organisasi BPKA DIY

STRUKTUR ORGANISASI
(Pergub DIY No. 123 tahun 2021)



Sumber : Pergub DIY Nomor 123 Tahun 2021

Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY terdiri dari:

- a. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kota Yogyakarta;
- b. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kabupaten Bantul;
- c. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kabupaten Kulonprogo;
- d. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kabupaten Gunungkidul; dan
- e. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kabupaten Sleman.

Gambar 2. Struktur Organisasi UPT (KPPD DIY)



2.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

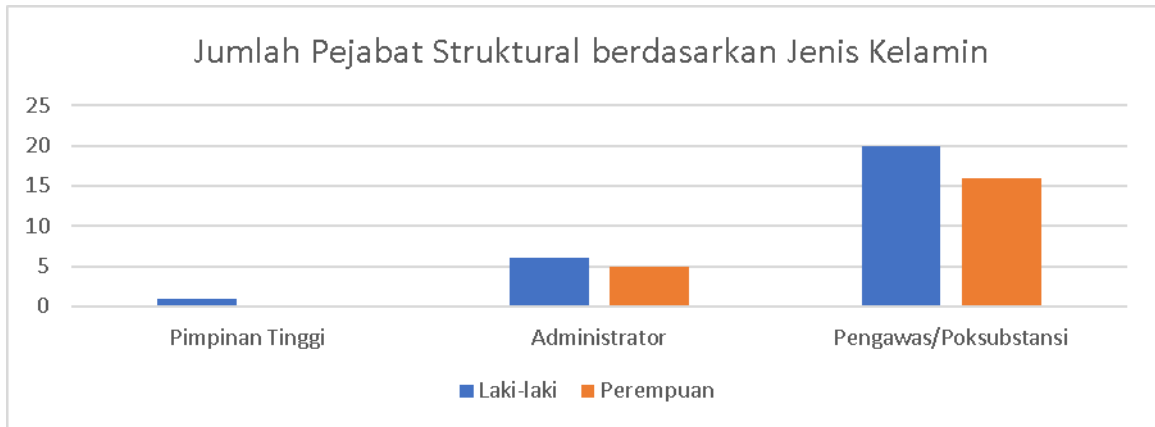
2.3.1. Sumber Daya Manusia

Faktor Sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kemandirian organisasi sangat bergantung pada kualitas personalia atau sumberdaya manusia yang ada di dalamnya. Sumberdaya manusia di BPKA DIY sampai dengan 31 Desember 2021, tercatat sebanyak 226 pegawai yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi 1 orang, jabatan administrasi 225 orang yang terdiri dari jabatan administrator 11 orang, jabatan pengawas 36 orang dan jabatan pelaksana 178 orang , sedang jabatan fungsional belum ada. Profil kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, pendidikan dan kebutuhan pegawai secara ideal.

a. Profil Pejabat Struktural BPKA DIY

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset, kebutuhan formasi jabatan BPKA DIY sebanyak 48

orang. Kondisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ada satu jabatan administrator (eselon III) yang belum terisi. Pejabat administrator (setara eselon III) di BPKA sebanyak 11 orang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, sedangkan pengawas dan kelompok substansi (setara eselon IV) sebanyak 36 orang terdiri 20 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keadilan dan kesetaraan gender dalam penentuan pengambilan kebijakan di BPKA DIY. Profil Pejabat Struktural di BPKA DIY disajikan dalam gambar di bawah:



Gambar3. Grafik Pejabat Struktural Berdasarkan jenis kelamin

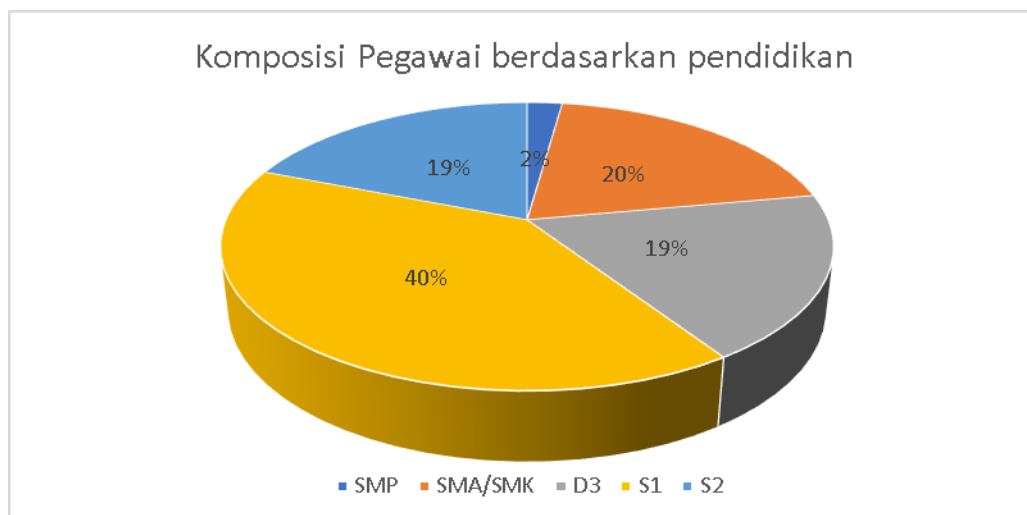
b. Profil Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

Jumlah pegawai BPKA DIY berdasarkan tingkat pendidikan per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada table 2.1 berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai BPKA DIY berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Sarjana S2	27	16
2	Sarjana S1	53	38
3	D3	22	20
4	SLTA	23	22
5	SMP	4	1

Jumlah pegawai BPKA DIY per 31 Desember pada Tabel 2-1 di atas terdistribusi dalam struktur organisasi BPKA DIY sesuai dengan kompetensi yang dimiliki tiap pegawai dan kebutuhan personil. Jika digambarkan dalam persentase berdasarkan tingkat pendidikan, maka komposisi jumlah pegawai seperti disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Dari gambar dapat dilihat bahwa jumlah pegawai BPKA didominasi oleh kualifikasi pendidikan S-1 (91 orang atau 40,26%), kemudian pegawai dengan pendidikan SLTA (45 orang atau 19,91%), pendidikan S-2 (43 orang atau 19,02%) diikuti pendidikan Diploma 3 (42 orang atau 18,58%) dan pendidikan SMP (5 orang atau 2,21%). Jika dilihat dan dibandingkan dengan analisa kebutuhan pegawai dari aspek kuantitasnya masing-masing kurang sebanyak 213 orang dimana 2 orang pegawai tidak memenuhi kualifikasi pada jabatan pelaksana, namun dari kualitas personil personil di BPKA DIY (dengan kebijakan menambah personil non PNS dan tenaga bantu (Naban) dianggap cukup dalam menunjang kinerja organisasi.

2.3.2. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 Tahun 2019 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 211/KEWP/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Badan pengelola Keuangan dan Aset Tahun 2021, Kebutuhan Sarana Prasarana kerja penunjang pada BPKA dan KPPD se-DIY terdiri dari Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya. Untuk aset tetap berupa Gedung Kantor 72 Unit, alat angkutan 54 unit, alat-alat kantor dan rumah tangga 9.159 unit dan alat-alat studio dan Komunikasi 739 unit, sedang aset tetap lainnya adalah buku kepastakaan 2.477 unit.

Kondisi riil sampai dengan akhir Desember 2021 kebutuhan sarana prasarana penunjang kerja organisasi meliputi ruang kerja, peralatan computer, alat telekomunikasi maupun alat transportasi telah tercukupi. Aset-aset yang dimiliki pada BPKA dan KPPD DIY di Kabupaten/Kota se-DIY senilai 208.296.941.061 rupiah dalam kondisi baik. Kondisi eksisting dan kebutuhan riil Sarana prasarana penunjang kerja organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Sarana-Prasarana di BPKA dan KPPD Kabupaten/Kota di DIY

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
Aset Tetap			
1	Gedung Kantor	72 unit	153.227.037.138
2	Alat-alat Angkutan	54 unit	6.004.322.342
3	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	9.256 unit	43.401.033.849
4	Alat-alat Studio dan Komunikasi	739 unit	5.447.597.042
Aset Tetap Lainnya			
1	Buku Perpustakaan	2.477 buku	216.950.691
	Jumlah		208.950.690

Sumber: Data Neraca Aset BPKA, per Desember 2021, data diolah (*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2021)

Sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional meliputi kendaraan dinas yang terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 9 (sembilan) unit kendaraan dipinjamakai, 33 (tiga puluh tiga) unit kendaraan operasional, 2 (dua) unit kendaraan angkutan barang (pick up) dan 30 (tiga puluh) unit kendaraan roda dua untuk operasional dan dipinjam pakai, sepeda 3 (tiga) unit dan 6 (enam) unit lain-lain angkutan (gerobak, troli, box motor). Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sampai dengan tahun 2022 mencapai ideal, namun apabila dilihat secara kualitatif masih perlu penambahan maupun *upgrading*. Untuk mengikuti dinamika penambahan pegawai, akan dilakukan inventarisasi tambahan sarana prasarana untuk menunjang kinerja.

Sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini secara umum mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPKA DIY. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

Selain itu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada publik/masyarakat wajib pajak, direncanakan pembangunan gedung KPPD DIY di Kota Yogyakarta dan KPPD DIY di Kabupaten Gunung Kidul yang dimulai dengan penyusunan DED, dokumen Amdal maupun dokumen perencanaan lainnya pada tahun 2023 dan selanjutnya akan dilakukan pembangunan fisik gedung. Perluasan tempat layanan di Samsat Pembantu Sewon juga direncanakan akan dilakukan perluasan untuk menunjang kenyamanan pembayaran pajak. Selain itu juga direncanakan pengadaan kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik layanan maupun jam layanan kepada masyarakat wajib pajak.

2.3.3. Instrumen Pendukung

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. BPKA DIY selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya dengan memanfaatkan sistem informasi yang dikembangkan secara mandiri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selama periode tahun 2017-2022 BPKA DIY telah membangun beberapa sistem informasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan retribusi dan pelayanan kesamsatan sebagai berikut :

➤ **Sistem Aplikasi Kesamsatan**

Sistem Aplikasi kesamsatan telah ada sejak Tahun 1989 dan terus mengalami pengembangan yaitu:

- a. Samsat *Online* yang memungkinkan seluruh wilayah Kabupaten/Kota di wilayah DIY dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten/Kota mana saja di wilayah DIY,
- b. *e-samsat*, memungkinkan wajib pajak dapat membayar pajak kendaraan bermotor melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank BPD DIY dan melakukan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pada kertas termal melalui mesin *E-POSTI*.

Pengembangan aplikasi kesamsatan ini merupakan salah satu upaya peningkatan pelayanan publik dalam rangka intensifikasi pajak daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.

➤ **Sistem Aplikasi Retribusi (*e-Ret*)**

Sistem Aplikasi Retribusi atau *e-Ret* dikembangkan dengan tujuan untuk membantu memudahkan dalam pemungutan retribusi daerah sesuai dengan aturan yang berlaku. Implementasinya dimungkinkan tercapainya proses transformasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan retribusi daerah melalui penyediaan sistem dan prosedur retribusi daerah.

➤ **Sistem Informasi Pendapatan Daerah**

Aplikasi Informasi Pendapatan Daerah, merupakan bagian dari aplikasi SIKPD. Pengguna aktif aplikasi ini adalah bendahara penerima untuk melakukan penatausahaan penerimaan pendapatan setiap hari secara real time, sehingga laporan pertanggungjawaban pertanggungjawaban, laporan keuangan OPD maupun laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat diselesaikan tepat waktu, transparan dan akuntabel.

➤ **Sistem Informasi Aplikasi Persediaan**

Aplikasi Persediaan berbasis Web adalah Aplikasi yang menghasilkan Laporan Persediaan yang akurat dan akuntabel. Aplikasi ini dibutuhkan dalam rangka membantu pencatatan persediaan untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada akun Persediaan dan Beban Persediaan dan sebagai kontrol penggunaan barang persediaan di masing-masing Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan Aplikasi Persediaan dapat diketahui jumlah dan nominal barang persediaan secara *real-time* sesuai dengan kebijakan akuntansi tentang persediaan.

2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset. Fungsi pengelolaan keuangan dan aset ditunjukkan melalui penyediaan dokumen penganggaran sampai ke dokumen pelaporan keuangan yang dibutuhkan dalam proses pembangunan daerah. Dokumen-dokumen tersebut antara lain :

- a) Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni dan APBD Perubahan
- b) Pergub Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni dan APBD Perubahan
- c) Laporan Keuangan Pemda Audited
- d) Perda Pertanggungjawaban APBD
- e) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)
- f) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
- g) Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ)
- h) Standard Belanja Kegiatan (SBK)

Pergub DIY Nomor 123 tahun 2021 mengamatkan beberapa ketugasan baru BPKA DIY dalam hal penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) dan Standar Belanja Kegiatan (SBK) yang semula diampu oleh BPKA DIY dan Biro Organisasi Setda DIY. Selain itu terdapat perubahan beberapa struktur penganggaran pada BPKA DIY yaitu belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga yang semula dianggarkan dalam DPA-SKPD pada SKPKD berpindah menjadi subkegiatan pada DPA SKPD; pembiayaan yang semula masuk dalam DPA-SKPD pada SKPKD berpindah menjadi DPA SKPD. Capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator RENSTRA BPKA DIY pada tahun 2017 – 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3. Pencapaian Kinerja Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSP	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Peningkatan Kualitas pengelolaan keuangan Daerah		Transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	
2.	Optimalisasi aset-aset Pengelola Barang Milik Daerah		Nilai rupiah aset-aset Pemda DIY		5.950.608.853	6.234.617.858	6.453.519.026	6.704.805.116	6.967.568.518	6.505.543.500	7.107.452.565	3.069.093.332	5.239.098.025	-	109,33	114,00	47,56	78,14	

Dalam upaya untuk mencapai target tersebut, BPKA DIY telah menentukan strategi dan kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan selama periode rentang waktu 2013 – 2018. Berdasarkan hasil yang telah dicapai selama rentang waktu tersebut menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DIY telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya. Capaian kinerja peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada rentang waktu 2018-2021 telah tercapai sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Indikator pertama yaitu peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah diukur secara kualitatif berdasarkan Persentase Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator kedua yaitu optimalisasi aset-aset pengelola barang milik daerah yang diukur secara kuantitatif dengan melihat nilai Proyeksi Optimalisasi Aset-aset Pengelola Barang Milik Daerah. Capaian indikator dimaksud didukung oleh Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Faktor pendorong ketercapaian sasaran tersebut yaitu :

1. Penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Pusat
2. Dukungan sarana dan prasarana yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang semakin baik
3. Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah
4. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah

Dalam rangka mencapai target sasaran pertama, beberapa hal yang menjadi faktor penghambat adalah sebagai berikut :

1. Dinamika kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan keuangan daerah
2. Kebijakan penggunaan SIPD, harus ditindaklanjuti dengan penyesuaian pada sistem informasi keuangan daerah (simpler.jogjaprovo.go.id) yg cukup menyita waktu sehingga mengakibatkan pekerjaan tertunda.

Realisasi optimalisasi aset-aset pada pengelola barang milik daerah tidak mencapai target dikarenakan faktor penghambat yang sifatnya eksternal, yaitu terjadinya pandemi COVID-19 secara global yang berdampak kepada terganggunya aspek-aspek ekonomi tidak hanya nasional namun juga regional. Dampak pandemi tersebut di wilayah DIY menyebabkan penyewa BMD mengakhiri kontrak di tahun 2020, di antaranya Jogja Expo Center. Pandemi COVID-19 ditindaklanjuti dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berpengaruh pada penyelenggaraan kegiatan-kegiatan berskala besar yang untuk sementara

tidak boleh diselenggarakan karena berpotensi untuk meningkatkan penularan virus. PPKM merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk memerangi pandemi Covid-19 yang sebelumnya, pemerintah sempat memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlangsung di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini dilaksanakan karena adanya inisiatif dari pemerintah daerah. Sedangkan kebijakan PPKM ini dilakukan serentak atas dasar komando pemerintah pusat. Selain itu banyak penyewa lahan BMD yang mengajukan keringanan pembayaran sewa. Pada tahun 2021 dilakukan penilaian ulang sewa Gedung JEC oleh tim penilai independen, namun harga sewa hasil *appraisal* tidak sesuai dengan target, sehingga mempengaruhi capaian kinerja optimalisasi aset.

Faktor pendorong kinerja optimalisasi aset yaitu :

1. Penyempurnaan regulasi tentang pemanfaatan barang milik daerah
2. Koordinasi yang lebih intensif antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam pemanfaatan barang milik daerah
3. Adanya lahan/bangunan BMD yang dipergunakan oleh penyewa
2. Inovasi dalam penghapusan yang sebelumnya setor tunai dilakukan secara nontunai dengan rekening tampungan penjualan BMD.
3. Pengembangan aplikasi aset tetap dan persediaan sanget membantu dalam kesesuaian prosedur pengelolaan BMD
4. Kodifikasi baru sesuai lampiran peraturan gubernur nomor 56 tahun 2020 sudah dapat dipahami dengan baik oleh pengurus barang di OPD.

Pencapaian kinerja BPKA DIY dalam kurun waktu 2018-2022 tidak terlepas dari dukungan anggaran penadanaan untuk melaksanakan tugas fungsi BPKA DIY. Anggaran dan realisasi pendanaan BPKA DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Alokasi anggaran pendapatan dan belanja untuk pencapaian kinerja layanan serta serapannya ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4. Anggaran Pendapatan BPKA DIY Tahun 2018 – 2020

URAIAN	2018	2019	2020
PENDAPATAN	1.828.036.366.283,00	1.934.073.885.772,71	1.731.318.063.980,54
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.828.036.366.283,00	1.934.073.885.772,71	1.731.318.063.980,54
Pajak Daerah	1.657.459.687.185,00	1.750.611.839.616,00	1.596.879.866.993,00
Hasil Retribusi Daerah	6.607.252.095,00	7.342.607.690,00	698.044.875,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	85.897.784.674,86	85.997.899.680,29	101.460.382.142,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	78.071.642.328,85	90.121.538.786,42	32.279.769.970,05
DANA PERIMBANGAN	2.376.710.501.213,00	2.467.472.059.005,00	2.395.248.332.317,00
Dana Bagi Hasil Pajak	130.729.634.000,00	84.306.517.000,00	115.924.403.473,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	33.269.000,00	36.431.000,00	31.627.168,00
Dana Bagi Hasil Cukai	4.903.054.000,00	5.210.616.300,00	3.895.404.028,00
Dana Alokasi Umum	1.314.372.147.000,00	1.351.102.020.000,00	1.234.516.326.000,00
Dana Alokasi Khusus	926.672.397.213,00	1.026.816.474.705,00	1.040.880.571.648,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	1.091.284.564.226,00	1.230.830.622.753,00	1.362.943.741.411,39
Pendapatan Hibah	79.955.500.347,00	8.520.100.000,00	7.533.500.000,00
Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus-Dana Keistimewaan	1.010.685.532.429,00	1.221.604.487.443,00	1.354.630.222.221,39
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	643.531.450,00	706.035.310,00	780.019.190,00

Tabel 5. Realisasi Pendapatan BPKA DIY Tahun 2018 – 2020

URAIAN	2018	2019	2020
PENDAPATAN	1.934.918.131.183,06	1.993.435.291.133,20	1.800.739.024.337,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.934.918.131.183,06	1.993.435.291.133,20	1.800.739.024.337,00
Pajak Daerah	1.717.291.718.438,00	1.773.940.604.572,00	1.646.559.198.863,00
Hasil Retribusi Daerah	6.991.961.130,00	7.432.218.400,00	736.782.032,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	85.097.737.606,37	85.960.824.196,14	101.460.382.151,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	125.536.714.008,69	126.101.643.965,06	51.982.661.290,54
DANA PERIMBANGAN	2.317.436.811.403,00	2.385.702.912.253,00	2.371.044.354.021,00
Dana Bagi Hasil Pajak	88.194.755.175,00	50.825.058.200,00	110.660.909.197,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	44.756.323,00	24.907.600,00	24.870.747,00
Dana Bagi Hasil Cukai	4.903.054.000,00	5.210.616.000,00	3.591.562.731,00
Dana Alokasi Umum	1.314.262.108.053,00	1.351.102.020.000,00	1.227.647.676.000,00
Dana Alokasi Khusus	910.032.137.851,00	978.540.310.453,00	1.029.119.335.346,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	1.085.018.984.579,00	1.230.858.985.753,00	1.362.368.884.411,00
Pendapatan Hibah	73.681.960.000,00	8.548.463.000,00	6.958.643.000,00
Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus-Dana Keistimewaan	1.010.685.532.429,00	1.221.604.487.443,00	1.354.630.222.221,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	651.492.150,00	706.035.310,00	780.019.190,00

Tabel 6. Anggaran Belanja BPKA DIY Tahun 2018- 2020

URAIAN	2018	2019	2020
BELANJA	143.800.071.600,00	155.153.103.130,81	221.476.886.478,00
BELANJA OPERASI	127.152.294.805,00	143.979.312.130,81	145.230.385.278,00
Belanja Pegawai	99.317.793.675,00	114.318.931.103,81	119.946.554.328,00
Belanja Barang dan Jasa	27.834.501.130,00	29.660.381.027,00	25.283.830.950,00
BELANJA MODAL	16.647.776.795,00	11.173.791.000,00	76.246.501.200,00
Belanja Modal Tanah	36.900.000,00	18.250.000,00	72.727.700.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.719.758.795,00	6.568.621.000,00	2.615.043.500,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.228.398.000,00	4.027.320.000,00	187.082.700,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.500.000,00	13.000.000,00	468.700.000,00
Belanja Modal Tetap Aset Lainnya	5.600.000,00	5.600.000,00	4.850.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	651.620.000,00	541.000.000,00	243.125.000,00

Tabel 7. Realisasi Belanja BPKA DIY Tahun 2018- 2020

URAIAN	2018	2019	2020
BELANJA	131.352.709.134,00	145.356.161.571,00	210.870.555.950,39
BELANJA OPERASI	117.099.495.920,00	135.373.617.731,00	134.874.831.006,39
Belanja Pegawai	91.545.667.603,00	107.981.352.512,00	111.522.337.649,39
Belanja Barang dan Jasa	25.553.828.317,00	27.392.265.219,00	23.352.493.357,00
BELANJA MODAL	14.253.213.214,00	9.982.543.840,00	75.995.724.944,00
Belanja Modal Tanah	11.048.800,00	4.010.200,00	72.515.441.840,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.117.667.800,00	6.069.422.640,00	2.579.495.904,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.503.860.814,00	3.365.749.000,00	187.082.700,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.400.000,00	13.000.000,00	467.255.000,00
Belanja Modal Tetap Aset Lainnya	5.590.800,00	5.462.000,00	4.449.500,00
Belanja Modal Aset Lainnya	609.645.000,00	524.900.000,00	242.000.000,00

Pada tahun 2021 terdapat dinamika perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi ini mencabut beberapa regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah, termasuk Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahn-perubahannya. Implikasi perubahan peraturan tersebut terdapat beberapa perubahan diantaranya klasifikasi komponen APBD meliputi komponen pendapatan (PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan komponen belanja (belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Oleh karena itu struktur APBD BPKA mulai tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Anggaran Pendapatan BPKA DIY Tahun 2021 - 2022

URAIAN	2021		2022
	Anggaran	Realisasi s.d Desember 2021	Anggaran
PENDAPATAN DAERAH	5.604.650.653.563,00	5.622.135.391.909,01	5.288.716.235.400,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.791.333.816.320,00	1.819.983.183.568,24	1.969.939.952.910,00
Pajak Daerah	1.668.485.236.037,00	1.688.443.843.923,00	1.831.695.736.270,00
Retribusi Daerah	805.090.775,00	1.020.834.115,00	789.740.775,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	93.923.341.444,00	96.338.516.913,54	104.889.783.509,00
Lain-lain PAD yang Sah	28.120.148.064,00	34.179.988.616,70	32.564.692.356,00
PENDAPATAN TRANSFER	3.805.740.337.243,00	3.794.830.634.411,00	3.311.199.782.490,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.804.935.291.933,00	3.794.050.615.221,00	3.310.328.489.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	805.045.310,00	780.019.190,00	871.293.490,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.576.500.000,00	7.321.573.929,77	7.576.500.000,00
Pendapatan Hibah	7.576.500.000,00	7.141.630.000,00	7.576.500.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	-	179.943.929,77	-

Tabel 9. Anggaran Belanja BPKA DIY Tahun 2018- 2020

URAIAN	2021		2022
	Anggaran	Realisasi s.d Desember 2021	Anggaran
BELANJA DAERAH	1.527.363.558.582,00	1.460.669.833.009,71	1.484.720.083.803,00
BELANJA OPERASI	169.452.512.330,00	157.872.694.090,20	118.000.203.561,00
Belanja Pegawai	136.601.510.770,00	129.044.649.565,00	82.057.309.019,00
Belanja Barang dan Jasa	32.851.001.560,00	28.828.044.525,20	35.942.894.542,00
BELANJA MODAL	2.680.144.000,00	2.549.120.030,00	3.238.526.360,00
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.579.619.000,00	1.522.408.530,00	3.096.566.360,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	143.600.000,00	140.984.000,00	91.960.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	956.925.000,00	885.727.500,00	50.000.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	90.726.238.027,00	53.344.634.701,00	88.131.263.899,00
Belanja Tidak Terduga	90.726.238.027,00	53.344.634.701,00	88.131.263.899,00
BELANJA TRANSFER	1.264.504.664.225,00	1.246.903.384.188,51	1.275.350.
Belanja Bagi Hasil	713.118.316.167,00	713.118.316.167,00	
Belanja Bantuan Keuangan	551.386.348.058,00	533.785.068.021,51	

Sasaran strategis BPKA pada tahun 2017 - 2022 mengacu pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026. Secara keseluruhan capaian kinerja BPKA sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun capaian kinerja sasaran strategis optimalisasi aset Pemda DIY tidak sesuai target. Berbagai upaya telah dilaksanakan BPKA DIY untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Sasaran OPD BPKA DIY diukur dengan menggunakan dua indikator, yaitu peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi aset-aset pengelola barang milik daerah.

RENSTRA BPKA DIY tahun 2017 - 2022 yang merupakan penjabaran operasional RPJMD DIY tahun 2017 - 2022 telah mengakomodir dinamika perubahan peraturan. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; maka perlu dilakukan penyesuaian dan pemutakhiran dokumen perencanaan. Melalui dokumen perencanaan ini akan diketahui keterkaitan antara sasaran, kebijakan dengan program serta keterkaitan antar kegiatan.

Selain itu sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset, maka penyesuaian yang dilakukan sampai pada level program kegiatan dan sub kegiatan. Untuk itu, indikator kinerja beserta realisasi kinerja tetap mengacu pada RPJMD DIY tahun 2017-2022 beserta penyandingannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Berikut ini disajikan tabel dukungan program kegiatan terhadap ketercapaian sasaran BPKA DIY.

Tabel 10. Sandingan nomenklatur Program RPJMD dengan Pemutakhirannya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya
1.Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	1.Program Peningkatan Pendapatan Daerah	1.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)
		2.Program Peningkatan Pendapatan KPPD	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya
		3.Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	2.Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		4.Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah	
		5.Program Penatausahaan Keuangan Daerah	
		6.Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	
		7.Program Administrasi Perkantoran	3.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	
2.Optimalisasi Aset-Aset Pemda DIY	Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Program Pendayagunaan Barang Milik Daerah	

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh BPKA DIY dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang meliputi lingkungan internal dan eksternal. Kondisi lingkungan tersebut akan memberikan kekuatan maupun kelemahan bagi organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jalannya organisasi dalam bentuk peluang dan ancaman. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY untuk 4 (empat) tahun mendatang sebagai berikut :

➤ Faktor Eksternal

Secara umum analisis terhadap faktor eksternal bertujuan untuk memetakan tantangan dan peluang yang dihadapi BPKA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

a. Peluang (opportunities)

- Meningkatnya kapasitas *sistem on line* pembayaran pajak, *one-stop service*, samsat keliling, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak.
- Meningkatnya efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah.
- Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan aset daerah.

- Sinkronisasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset.
- Potensi lain-lain PAD yang sah yang dapat menunjang pendapatan Pemda DIY.

b. Tantangan/ancaman/hambatan (threats)

- Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat dan perubahan lifestyle (gaya hidup) masyarakat yang semakin melek teknologi informasi menuntut kecepatan, ketepatan dan kepraktisan pelayanan publik ;
- Mengidentifikasi aset-aset idle di lingkungan Pemda DIY yang potensial dapat dioptimalkan;
- Menyediakan Penilai Pemerintah dalam rangka Penilaian Barang Milik Daerah terutama untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan;
- Pengintegrasian sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset.
- Sebagai implementasi dari Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah maka perlu untuk memiliki aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan Pemda sebagai aplikasi pendamping.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
- Optimalisasi obyek-obyek PAD baru.

Pada Tahun 2020, Pemerintah menetapkan pandemic COVID-19 sebagai Bencana Nasional non alam yang sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian masyarakat hampir di semua sektor, khususnya pada sektor ekonomi yang menurun drastis. Adanya pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis. Hal tersebut berimbas pula pada menurunnya realisasi PAD diantaranya yang berasal dari pemanfaatan sewa BMD, retribusi dan dari sektor pajak. Terjadinya penurunan pendapatan yang berasal dari optimalisasi aset atau barang milik daerah selama masa pandemi diantaranya disebabkan penurunan kemampuan sewa atas aset-aset Pemda DIY.

Sektor pajak merupakan penyumbang PAD terbesar. Dampak ekonomi akibat pandemi mempengaruhi kemampuan masyarakat wajib pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, untuk itu Pemda DIY telah melakukan berbagai upaya untuk meringankan beban masyarakat wajib pajak sekaligus mendongkrak penerimaan pajak, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Pergub DIY) Nomor 26 tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN-KB) yang disahkan pada 1 April 2020 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Selain itu di akhir Tahun 2020 diupayakan penambahan pelayanan pembayaran pajak melalui bank selain BPD.

Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan pelayanan prima merupakan suatu tantangan yang harus

dihadapi oleh seluruh penyelenggara pemerintahan, demikian pula BPKA DIY sebagai institusi pengelola keuangan dan aset Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta mengeliminir kelemahan dan ancaman, maka BPKA DIY dengan dukungan APBD DIY akan mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

➤ Faktor Internal

Analisis terhadap faktor internal bertujuan untuk memahami kondisi perangkat daerah dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kekuatan maupun kelemahan agar dapat dieliminir dampaknya.

a. Kekuatan (strengths)

- Koordinasi yang baik antara BPKA dengan OPD berpendapatan.
- Adanya kebijakan Insentif sebagai pendorong kinerja bagi OPD berpendapatan.
- Pajak kendaraan bermotor masih merupakan sumber pendapatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam PAD.
- Kemudahan pembayaran pajak maupun retribusi melalui sistem online atau *electronic payment*.
- Adanya Perda yang mengatur.
- Mekanisme penarikan pendapatan cukup jelas.
- Produktivitas organisasi yang cukup baik;
- Penetapan peraturan yang mendukung optimalisasi kinerja BUMD dan BUKP;
- Optimalisasi barang milik daerah atau aset idle yang belum dilakukan kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga.

a. Kelemahan (weakness)

- Keraguan OPD pengelola pendapatan untuk mengoptimalkan objek pendapatan dikarenakan tidak adanya mandat dalam uraian tugas pokok dan fungsi OPD;
- Tidak adanya program dan kegiatan di OPD pengelola pendapatan yang mengarah secara khusus untuk melakukan optimalisasi pendapatan daerah;
- Sarana dan prasarana objek pendapatan daerah yang ada di OPD berpendapatan statusnya belum jelas dan kurang terpelihara;
- Beberapa lokasi sumber pendapatan daerah/retribusi berada jauh dari pusat manajemen sehingga rentang kendali pengawasan dan pengendalian lemah;
- BUMD dan BUKP belum mampu memberikan kontribusi ke PAD;

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengelolaan keuangan dan aset daerah perlu diidentifikasi tugas dan fungsi pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Beberapa permasalahan yang menghambat target kinerja program yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- Dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan terdapat permasalahan utama yang dihadapi yaitu antara lain intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap objek pendapatan baru belum dapat dilaksanakan secara optimal;
- Perlunya pengklasifikasian dan pencermatan potensi PAD yang bisa dibuatkan payung hukum dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
- Kesiapan sumber daya manusia dalam menterjemahkan target kinerja dari rencana belanja dan kegiatan yang diprioritaskan;
- Beragamnya penafsiran terhadap subyek dan obyek belanja;
- Belum ada kerangka kebijakan yang komprehensif terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah belum efektif dilaksanakan;
- Perlu dilakukan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dari penganggaran sampai akuntansi dan aset
- Perlunya peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan.

3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan, Sasaran Pemerintah Daerah

Mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional.

Berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan DIY tahun 2023-2026 :

Tabel 11. Tujuan dan Sasaran Pemda DIY tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (good Government)	Indikator Reformasi Birokrasi dari 81,08 (A) (2022) menjadi 84,38(A)(2026)	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK

Sumber : RPD Pemda DIY tahun 2023-2026

Menurut Pasal 11 huruf (b) Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset. Ketentuan pada Perdais tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset. Tugas dan fungsi BPKA terkait langsung dengan tujuan Pemda DIY yaitu Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good government*) dengan sasaran Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan dan indikator sasaran Opini BPK. Sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset, dapat digamabrkan dukungan tugas dan fungsi BPKA sebagai berikut :

Tabel 12. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dan Rincian Tugas Fungsi BPKA DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pemerintah Daerah	Urusan/Tugas/Fungsi BPKA
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (good Government)	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	<p>Urusan: Penunjang Pemerintah : Keuangan</p> <p>Tugas : menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset</p>

3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Keselarasannya perencanaan antara tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan RENSTRA dilakukan telaah terhadap RENSTRA Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan BPKAD Kabupaten/Kota di DIY. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis baik dalam Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan BPKAD Kabupaten/Kota di DIY terutama yang terkait langsung dengan pelayanan BPKA DIY.

Sasaran Kementerian Dalam Negeri dalam RENSTRA 2020 - 2024 yang terkait dengan ketugasan BPKA DIY yaitu : Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi. Sedangkan sasaran RENSTRA Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 yang terkait dengan ketugasan BPKA DIY di antaranya meliputi : perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas, hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan serta Pengelolaan kekayaan negara yang optimal

Prioritas dalam Renstra K/L dan Strategi dalam Renstra Provinsi tersebut diatas menjadi salah satu acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam mewujudkan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pendapatan pajak daerah dalam peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan Salah satu ukuran keberhasilan perencanaan dan pengelolaan keuangan tingkat nasional yang dipengaruhi oleh perencanaan dan pengelolaan di daerah adalah keselarasan dan transparansi rencana pembangunan dan pengelolaan nasional dengan rencana kerja daerah.

3.4. Telaahan Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tidak ada keterkaitan langsung antara tugas fungsi BPKA DIY dengan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu Strategis

Dalam menjalankan fungsinya, BPKA DIY menghadapi beberapa isu strategis yang harus diantisipasi dan dikelola. Isu-isu strategis tersebut dapat menjadi hambatan maupun peluang bagi BPKA dalam meningkatkan pelayanan. Isu-isu strategis yang muncul adalah sebagai

berikut:

1. Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang tepat waktu;
2. Percepatan dan perluasan penggunaan transaksi digital;
3. Optimalisasi penggunaan sisa dana transfer dan Potensi Lain-lain PAD;
4. Penilaian kembali Barang Milik Daerah maupun dalam rencana penghapusan dan pemindahtanganan;
5. Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang belum optimal sepenuhnya dilaksanakan sehingga kurang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
6. Meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel; intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
7. Optimalisasi pendapatan dan aset;
8. Meningkatkan efektifitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerjasama dengan pihak ketiga;
9. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur serta sarana prasarana pengelolaan pendapatan dalam upaya peningkatan pendapatan;
10. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
11. Pencapaian target Deviden BUMD dan BUKP DIY yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
12. Transformasi Kelembagaan BUKP yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode perencanaan yaitu 4 (empat) tahun, sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih oleh Perangkat Daerah pada akhir tahun perencanaan.

Sebagaimana ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset, tugas yang diampu oleh BPKA DIY yaitu menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset. Untuk itu tujuan yang hendak dicapai oleh BPKA DIY dalam RENSTRA 2023-2026 adalah “Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel”.

Pengertian transparan menurut Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (1) yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan akuntabel sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (5) yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka BPKA DIY harus menjadi institusi pengelola keuangan dan aset daerah yang bisa memberikan informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai yaitu :

1. Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah
2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
3. Optimalisasi aset-aset Pemda DIY

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Pemda DIY dan Perangkat Daerah BPKA DIY beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 13. Tujuan dan Sasaran Pemda DIY tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (good Government)	Indikator Reformasi Birokrasi dari 81,08 (A) (2022) menjadi 84,38(A)(2026)	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK

Indikator tujuan dan sasaran BPKA DIY kami sampaikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 104. Tujuan, indikator tujuan/sasaran BPKA DIY tahun 2023-2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Meta Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				Baseline (2022)	Tahun 1 (2023)	Tahun 2 (2024)	Tahun 3 (2025)	Tahun 4 (2026)
	Tujuan : Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel serta peningkatan pendapatan daerah	Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Transparan : keterlibatan dan aksesibilitas publik dalam proses pengelolaan keuangan Akuntabel : dapat dipertanggungjawabkan	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran :							
1.	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Nilai Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	A	AA	AA	AA
2.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	Meningkatnya PAD (20%) APBD yang tepat dan akurat (20) Laporan keuangan daerah yang akuntabel (20%) Penatausahaan Keuangan daerah yang akurat (20%) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (20%).	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi Barang Milik Daerah	Nilai rupiah optimalisasi BMD	6.967.568.518	9.016.589.475	9.378.609.475	9.703.109.475	10.003.409.475

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan hal yang sangat menentukan dalam mencapai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Strategi yang digunakan BPKA DIY tidak terlepas dari kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pernyataan strategi dan kebijakan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 15. Pernyataan Strategi dan Kebijakan

STRATEGI	KEBIJAKAN
<ol style="list-style-type: none"> 1.Perbaikan manajemen semua potensi pendapatan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain; 2.Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan; 3.Penataan kelembagaan BUMD; 4.Penguatan modal dan pengembangan usaha; 5.Perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; 2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah; 3. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat; 4. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah; 5. Ketepatan dan keakuratan proses pengelolaan keuangan.
<ol style="list-style-type: none"> 1.Melaksanakan inventarisasi barang milik daerah agar dapat mengidentifikasi asset-aset <i>idle</i>, 2.Melaksanakan Road Map Pemanfaatan Barang Milik Daerah 3.Melaksanakan kajian terhadap aset <i>idle</i> untuk memperoleh anallisis kegunaan terbaik dan tertinggi (<i>highest best use /HBU</i>) sebelum dilaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah. 4.Mengikutkan SDM yang memenuhi syarat dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas kompetensi, profesional dan produktivitas SDM pejabat pengelola barang milik daerah di lingkungan Pemda DIY. 2. Peningkatan peran optimalisasi barang milik daerah sebagai salah satu kontributor peningkatan PAD. 3. Penyusunan SOP Pengelolaan Barang Milik Daerah supaya tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur 4. Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan

STRATEGI	KEBIJAKAN
seminar/kursus/pelatihan pengelolaan barang milik daerah terutama yang terkait dengan penilaian barang milik daerah.	5. Mengikutkan SDM yang memenuhi syarat dalam seminar/kursus/pelatihan pengelolaan barang milik daerah terutama yang terkait dengan penilaian barang milik daerah.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY menetapkan rangkaian program dan kegiatan sesuai dengan Urusan Penunjang, yaitu Urusan Keuangan. Prgoram adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi BPKA DIY. Proses bisnis program perangkat daerah (dalam hal ini BPKA DIY) secara hierarki terkait dan memberikan dukungan pada capaian Sasaran Gubernur, capaian program Pemerintah Daerah (Program Pemda), capaian sasaran perangkat daerah , serta bagaimana proses bisnis kegiatan beserta indikator keluaran (output) mendukung capaian hasil (outcome) program sesuai dengan kerangka logis RPD DIY tahun 2023 – 2026. Indikator program Pemda dan BPKA dapat dijabarkankan sebagai berikut :

Tabel 16. Program Pemda dan Indikator Program Pemda tahun 2023 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pemda	Indikator
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (<i>good Government</i>)	Indikator Reformasi Birokrasi dari 81,08 (A) (2022) menjadi 84,38(A)(2026)	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik

Tabel 17. Program dan Indikator Program BPKA DIY tahun 2023 - 2026

Program Pemda	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan pendapatan daerah
	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur

Adapun penjabaran program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKA DIY adalah sebagai berikut :

Tabel 118. Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Tahun 2023 – 2026

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Capaian/Hasil Kegiatan dan Keluaran Kegiatan), dan Sub Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel serta peningkatan pendapatan daerah				Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset yang transparan dan akuntabel	100	100		100		100		100		100		100		Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah		Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan		100	100		100		100		100		100		100		Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah	n/a	100%	1.377.08.825.542	100%	820.879.520.189	100%	844.740.431.389	100%	876.380.119.389	100%	909.560.271.389	100%	3.451.560.342.356	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD	PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026					
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS Murni & Perubahan; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD Murni & Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Murni & Perubahan; serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100%	100%	3.894.20.000	100%	4.277.813.000	100%	4.422.515.000	100%	4.668.766.000	100%	4.916.643.000	100%	18.285.737.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 dokumen	100%	405.695.000	2 dokumen	406.216.400	2 dokumen	500.000.000	2 dokumen	550.000.000	2 dokumen	600.000.000	8 dokumen	2.056.216.400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PAS yang Disusun	1 dokumen	100%	403.144.000	2 dokumen	406.216.400	2 dokumen	500.000.000	2 dokumen	550.000.000	2 dokumen	600.000.000	8 dokumen	2.056.216.400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD	PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026					
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA SKPD yang Diverifikasi	33 dokumen	100%	42.851.750	32 dokumen	77.375.900	32 dokumen	60.000.000	32 dokumen	70.000.000	32 dokumen	80.000.000	128 dokumen	287.375.900	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang Diverifikasi		100%	37.396.750	32 dokumen	168.393.200	32 dokumen	80.000.000	32 dokumen	90.000.000	32 dokumen	100.000.000	128 dokumen	438.393.200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	33 dokumen DPA	100%	670.859.000	32 dokumen DPA	964.391.100	32 dokumen DPA	720.000.000	32 dokumen DPA	730.000.000	32 dokumen DPA	740.000.000	128 dokumen DPA	3.154.391.100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	100%	1.047.303.500	2 dokumen	1.131.022.200	2 dokumen	1.150.000.000	2 dokumen	1.200.000.000	2 dokumen	1.250.000.000	8 dokumen	4.731.022.200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	2 dokumen	100%	1.152.660.000	2 dokumen	976.456.800	2 dokumen	1.250.000.000	2 dokumen	1.300.000.000	2 dokumen	1.350.000.000	8 dokumen	4.876.456.800	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD	PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026					
			tentang Penjabaran Perubahan APBD																
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	30 dokumen	100%	134.310.000	30 dokumen	147.741.000	30 dokumen	162.515.000	30 dokumen	178.766.000	30 dokumen	196.643.000	120 dokumen	685.665.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya evaluasi APBD, APBD P dan Pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	100%	100%	513.534.000	100%	762.813.900	100%	823.100.000	100%	884.000.000	100%	952.800.000	100%	3.422.713.900	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang		5 Kepgub	100%	168.625.000	5 Kepgub	251.600.000	5 Kepgub	270.100.000	5 Kepgub	290.100.000	5 Kepgub	312.100.000	20 Kepgub	1.123.900.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD	PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026					
			Penjabaran APBD Kabupaten/Kota																
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	5 Keggub	100%	167.24 0.000	5 Keggub	250.10 0.000	5 Keggub	269.10 0.000	5 Keggub	288.10 0.000	5 Keggub	310.90 0.000	20 Keggub	1.118.20 0.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	5 Keggub	100%	172.60 5.000	5 Keggub	255.90 0.000	5 Keggub	274.90 0.000	5 Keggub	295.80 0.000	5 Keggub	318.80 0.000	20 Keggub	1.145.40 0.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD	PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026					
			Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 dokumen	100%	5.064.000	2 dokumen	5.213.900	2 dokumen	9.000.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	11.000.000	8 dokumen	35.213.900	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) serta Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	100%	100%	458.088.000	100%	396.400.700	100%	740.000.000	100%	760.000.000	100%	780.000.000	100%	2.676.400.700	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
			Koordinasi	Jumlah Laporan	6 dokumen	100%	118.09	7	122.68	7	130.00	7	140.00	7	150.00	28	542.680.	Badan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD	PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026					
			dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			0.000	dokumen	0.000	dokumen	0.000	dokumen	0.000	dokumen	0.000	dokumen	000	Pengelola Keuangan dan Aset	
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	8000 dokumen	100%	339.998.000	8000 dokumen	273.720.700	8000 dokumen	610.000.000	8000 dokumen	620.000.000	8000 dokumen SP2D	630.000.000	32000 dokumen	2.133.720.700	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Koordinasi dan Pelaksanaan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan	100%	100%	817.370.500	100%	892.530.100	100%	858.676.000	100%	876.743.000	100%	894.218.000	100%	3.522.167.100	Badan Pengelola	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD	PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026					
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan, Penyusunan Raperda dan RaPerkada Pertanggungjawaban APBD; Konsolidasi LK SKPD, BLUD dan LK Pemda; Penyusunan Tindakan lanjut terhadap LHP BPK; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTGR; Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah; Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD															
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 dokumen	100%	115.643.000	12 laporan	114.357.800	12 laporan	122.000.000	12 laporan	124.000.000	12 laporan	126.000.000	48 laporan	486.357.800	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD	PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026					
			Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 dokumen	100%	23.459.000	1 laporan	17.484.400	1 laporan	27.000.000	1 laporan	29.000.000	1 laporan	31.000.000	4 laporan	104.484.400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 dokumen	100%	424.305.750	1 dokumen	487.263.600	1 dokumen	433.000.000	1 dokumen	436.000.000	1 dokumen	438.000.000	4 dokumen	1.794.263.600	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban	1 laporan	100%	4.975.000	1 dokumen	5.051.600	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	8.000.000	1 dokumen	9.000.000	4 dokumen	29.051.600	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD	PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026					
			Pelaksanaan APBD	Pelaksanaan APBD															
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		100%	8.871.000	1 dokumen	5.778.400	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	11.000.000	1 dokumen	12.000.000	4 dokumen	38.778.400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan Daerah	n/a	100%	0	1 dokumen	6.000.000	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	8.000.000	1 dokumen	9.000.000	4 dokumen	30.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 sistem	100%	158.081.250	1 dokumen	132.777.200	1 dokumen	160.000.000	1 dokumen	162.000.000	1 dokumen	164.000.000	4 dokumen	618.777.200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	150 orang	100%	48.419.000	100 orang	61.730.100	100 orang	52.000.000	100 orang	54.000.000	100 orang	56.000.000	400 orang	223.730.100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	7 BLUD	100%	33.616.500	8 lembaga	62.087.000	8 lembaga	40.676.000	8 lembaga	44.743.000	8 lembaga	49.218.000	8 lembaga	196.724.000	Badan Pengelola	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD	PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026					
			BLUD Provinsi																
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah; Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;; Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; serta Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	100%	100%	1.371.325.613.042	100%	814.549.962.489	100%	837.896.140.389	100%	869.190.610.389	100%	902.016.610.389	100%	3.423.653.323.656	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
			Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	n/a	100%	1.211.028.500	9 dokumen	2.706.430.000	9 dokumen	1.271.430.000	9 dokumen	1.300.000.000	9 dokumen	1.300.000.000	36 dokumen	6.577.860.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 tahun	100%	531.908.734.594	1 laporan	20.000.000.000	1 laporan	15.000.000.000	1 laporan	15.000.000.000	1 laporan	15.000.000.000	4 laporan	65.000.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 tahun	100%	94.764.494.559	1 laporan	20.000.000.000	1 laporan	20.000.000.000	1 laporan	20.000.000.000	1 laporan	20.000.000.000	4 laporan	80.000.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 tahun	100%	743.441.355.389	1 laporan	771.843.532.489	1 laporan	801.624.710.389	1 laporan	832.890.610.389	1 laporan	865.716.610.389	4 laporan	3.272.075.463.656	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			PROGRAM PENGELOLAA	Peningkatan pendapatan	n/a	n/a	10.096.956.40	509.55	10.947.640.40	262.97	12.563.000.00	266.41	12.902.000.00	160.05	13.260.000.00	160.05	49.672.640.400	Badan Pengelola	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD	PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026					
			N PENDAPATAN DAERAH	daerah			0	8.989.944,00	0	6.208.574,00	0	1.457.941,00	0	8.080.379,00	0	8.080.379,00		a Keuangan dan Aset	
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100%	100%	10.096.956.400	100%	10.947.640.400	100%	12.563.000.000	100%	12.902.000.000	100%	13.260.000.000	100%	49.672.640.400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	7 dokumen	100%	1.931.023.000	1 dokumen	1.650.183.100	1 dokumen	3.150.000.000	1 dokumen	3.307.000.000	1 dokumen	3.472.000.000	4 dokumen	11.579.183.100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	n/a	100%	96.076.000	1 laporan	98.030.000	1 laporan	105.000.000	1 laporan	110.000.000	1 laporan	115.000.000	4 laporan	428.030.000	Badan Pengelola Keuangan dan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD	PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026					
			Kebijakan Pajak Daerah														Aset		
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	n/a	100%	584.380.000	1 laporan	598.279.800	1 laporan	643.000.000	1 laporan	675.000.000	1 laporan	708.000.000	4 laporan	2.624.279.800	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	n/a	100%	2.208.673.400	5 laporan	2.861.438.500	5 laporan	2.400.000.000	5 laporan	2.500.000.000	5 laporan	2.600.000.000	25 laporan	10.361.438.500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	n/a	100%	5.276.804.000	5 laporan	5.689.709.000	5 laporan	6.210.000.000	5 laporan	6.250.000.000	5 laporan	6.300.000.000	20 laporan	24.449.709.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	n/a	100%	0	1 laporan	50.000.000	2 laporan	55.000.000	1 laporan	60.000.000	1 laporan	65.000.000	4 laporan	230.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY			Optimalisasi Barang Milik Daerah	6.704.805.116	Rp6.967.568.518		Rp9.016.589.475		Rp9.378.609.475		Rp9.703.109.475		Rp10.03.409.475		Rp10.03.409.475		Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur	100%	100%	4.798.625.500	100%	5.019.18.240	100%	4.997.000.000	100%	5.064.000.000	100%	5.131.000.000	100%	20.211.18.240	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
			Pengelolaan Barang Milik	Terlaksananya Penyusunan	100%	100%	4.798.625.500	100%	5.019.18.240	100%	4.997.000.000	100%	5.064.000.000	100%	5.131.000.000	100%	20.211.18.240	Badan Pengelola	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD	PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026					
			Daerah	Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah															
			Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	100%	332.64 0.000	1 dokum en	536.42 2.200	1 dokum en	420.00 0.000	1 dokum en	440.00 0.000	1 dokum en	460.00 0.000	4 dokum en	1.856.42 2.200	Badan Pengelol a Keuanga n dan Aset	DIY
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	100%	26.211. 000	1 dokum en	30.000. 000	1 dokum en	32.000. 000	1 dokum en	34.000. 000	1 dokum en	36.000. 000	4 dokum en	132.000. 000	Badan Pengelol a Keuanga n dan Aset	DIY
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		100%	283.36 2.000	1 lapora n	300.00 0.000	1 lapora n	325.00 0.000	1 lapora n	350.00 0.000	1 dokum en	375.00 0.000	4 lapora n	1.350.00 0.000	Badan Pengelol a Keuanga n dan Aset	DIY
			Pengamanan Barang Milik	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan	n/a	100%	2.813.4 89.500	1 lapora	3.489.5 13.040	1 lapora	3.200.0 00.000	1 lapora	3.200.0 00.000	1 lapora	3.200.0 00.000	4 lapora	13.089.5 13.040	Badan Pengelol	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD	PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026					
			Daerah	Barang Milik Daerah				n		n		n		n		n		a Keuangan dan Aset	
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	6 dokumen	100%	1.099.510.000	2 dokumen	419.504.500	2 dokumen	700.000.000	2 dokumen	700.000.000	2 dokumen	700.000.000	8 dokumen	2.519.504.500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	n/a	100%	243.413.000	1 laporan	243.678.500	1 laporan	320.000.000	1 laporan	340.000.000	1 laporan	360.000.000	4 laporan	1.263.678.500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
	Meningkatkannya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah		Kategori RB Perangkat Daerah	A	A		A		A		AA		AA		AA			Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,16	87,25	99.450.130.521	87,25	121.405.752.232	87,50	198.957.222.891	87,75	185.821.710.674	88,25	165.951.006.521	88,50	672.135.692.318	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
			Perencanaan, Penganggaran, dan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%	100%	84.568.000	100%	123.180.800	100%	123.000.000	100%	127.200.000	100%	132.000.000	100%	505.380.800	Badan Pengelola	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD	PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026					
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	100%	25.538.000	8 dokumen	49.812.200	8 dokumen	46.000.000	8 dokumen	47.000.000	8 dokumen	48.000.000	32 dokumen	190.812.200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	100%	0	2 dokumen	24.998.900	2 dokumen	27.000.000	2 dokumen	28.000.000	2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	109.998.900	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	100%	38.623.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	26.000.000	2 dokumen	27.000.000	2 dokumen	28.000.000	8 dokumen	106.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 dokumen	100%	20.407.000	16 laporan	23.369.700	16 laporan	24.000.000	16 laporan	25.200.000	16 laporan	26.000.000	64 laporan	98.569.700	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan	100%	100%	81.991.604.519	100%	92.198.222.386	100%	90.397.725.893	100%	94.915.937.188	100%	99.658.409.048	100%	377.170.294.515	Badan Pengelola Keuangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD	PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026					
				Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD															
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	100%	81.727.189.019	234 org/bln	91.920.792.386	234 org/bln	90.104.225.893	234 org/bln	94.609.437.188	234 org/bln	99.339.909.048	234 org/bln	375.974.364.515	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			100%	235.200.000		246.180.000		260.000.000		270.000.000		280.000.000		1.056.180.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	100%	16.715.500	2 dokumen	17.750.000	2 dokumen	18.500.000	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	22.000.000	8 dokumen	78.250.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /	12 dokumen	100%	12.500.000	12 dokumen	13.500.000	12 dokumen	15.000.000	12 dokumen	16.500.000	12 dokumen	16.500.000	48 dokumen	61.500.000	Badan Pengelola Keuangan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD	PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026					
			Keuangan Bulanan/ Triwulanan/S emesteran SKPD	Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD													n dan Aset		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%	94.920.000	100%	98.520.000	100%	110.000.000	100%	120.000.000	100%	130.000.000	100%	458.520.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	n/a	100%	94.920.000	2laporan	98.520.000	2 laporan	110.000.000	2 laporan	120.000.000	2 laporan	130.000.000	8 laporan	458.520.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaksaaan Kinerja SKPD	n/a	n/a	0	n/a	48.649.900	100%	31.500.000	100%	33.000.000	100%	35.000.000	100%	148.149.900	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	n/a	n/a	0	12 dokumen	48.649.900	12 dokumen	31.500.000	12 dokumen	33.000.000	12 dokumen	35.000.000	48 dokumen	148.149.900	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan	100%	100%	1.817.603.000	100%	2.884.842.900	100%	3.067.646.250	100%	3.172.188.563	100%	3.266.120.491	100%	12.390.798.204	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD	PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026					
				Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 jenis	100%	122.99 7.000	12 paket	145.54 3.800	12 paket	145.84 6.250	12 paket	153.63 8.563	12 paket	161.82 0.491	48 paket	606.849. 104	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 buah	100%	419.07 8.000	8 paket	517.43 0.500	8 paket	480.00 0.000	8 paket	504.00 0.000	8 paket	529.20 0.000	32 paket	2.030.63 0.500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	24 jenis	100%	257.05 6.000	20 paket	264.84 2.000	20 paket	280.00 0.000	20 paket	290.00 0.000	20 paket	300.00 0.000	80 paket	1.134.84 2.000	Badan Pengelola	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD	PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026					
			Tangga	Disediakan															
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	n/a	100%	52.729.200	8 paket	68.540.800	8 paket	58.000.000	8 paket	62.000.000	8 paket	65.000.000	32 paket	253.540.800	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 paket	100%	338.970.800	24 paket	395.112.700	24 paket	390.000.000	24 paket	410.000.000	24 paket	430.500.000	96 paket	1.625.612.700	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	100%	48.792.000	6 dokumen	53.454.800	6 dokumen	58.000.000	6 dokumen	59.650.000	6 dokumen	60.000.000	24 dokumen	231.104.800	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	100%	463.966.000	12 dokumen	1.276.209.000	12 dokumen	1.530.000.000	12 dokumen	1.560.600.000	12 dokumen	1.580.000.000	48 dokumen	5.946.809.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	299 m3	100%	54.386.000	1 dokumen	63.032.300	1 dokumen	65.800.000	1 dokumen	72.300.000	1 dokumen	79.600.000	4 dokumen	280.732.300	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	n/a	100%	59.628.000	1 dokumen	100.677.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	60.000.000	4 dokumen	280.677.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Pengadaan	Terlaksananya	100%	100%	3.184.8	100%	12.724.	100%	99.206.	100%	81.139.	100%	57.303.	100%	250.374.	Badan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD	PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026					
			Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya			39.360		426.010		310.000		800.000		950.000		486.010	Pengelola Keuangan dan Aset	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a	100%	0	2 unit	830.375.000	1 unit	300.000.000	-	0	1 unit	350.000.000	4 unit	1.480.375.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 jenis	100%	52.885.000	1 paket	242.531.200	-	810.000.000	-	120.000.000	1 paket	150.000.000	2 paket	1.322.531.200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 jenis	100%	1.364.848.360	6 paket	2.254.422.610	6 paket	1.465.900.000	6 paket	1.635.000.000	6 paket	2.160.000.000	24 paket	7.515.322.610	Badan Pengelola Keuangan dan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD	PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026					
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	100%	184.280.000	3 unit	7.946.794.600	3 unit	89.702.160.000	2 unit	72.400.000.000	2 unit	47.600.000.000	3 unit	217.648.954.600	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	100%	1.582.826.000	3 unit	1.450.302.600	3 unit	6.928.250.000	3 unit	6.984.800.000	3 unit	7.043.950.000	12 unit	22.407.302.600	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	8.412.861.846	100%	8.797.926.036	100%	1.632.260.000	100%	1.750.960.000	100%	588.801.000	100%	12.769.947.036	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	n/a	100%	36.977.000	12 dokumen	38.034.000	12 dokumen	67.500.000	12 dokumen	70.500.000	12 dokumen	71.750.000	12 dokumen	247.784.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	100%	3.532.531.046	12 laporan	3.608.922.586	12 laporan	1.067.000.000	12 laporan	1.173.700.000	12 laporan	1.291.000	48 laporan	5.850.913.586	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Penyediaan	Jumlah Laporan	n/a	100%	445.05	6	519.76	6	56.760.	6	56.760.	6	56.760.	24	690.049.	Badan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD	PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026					
			Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5.000	laporan	9.400	laporan	000	laporan	000	laporan	000	laporan	400	Pengelola Keuangan dan Aset	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	n/a	100%	4.398.298.800	6 laporan	4.631.200.050	6 laporan	441.000.000	6 laporan	450.000.000	6 laporan	459.000.000	24 laporan	5.981.200.050	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%	3.863.733.796	100%	4.529.984.200	100%	4.388.780.748	100%	4.562.624.923	100%	4.836.725.982	100%	18.318.115.853	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
			Penyediaan	Jumlah Kendaraan	1 unit	100%	9.590.0	1 unit	10.980.	1 unit	13.000.	1 unit	14.000.	1 unit	15.000.	1 unit	52.980.0	Badan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD	PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026					
			Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			00		000		000		000		000		00	Pengelola Keuangan dan Aset	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	100%	617.27 1.000	5 paket	631.28 1.000	5 paket	742.20 8.748	5 paket	755.05 2.923	5 paket	868.15 3.982	5 paket	2.996.69 6.653	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit	100%	808.63 7.796	24 unit	831.00 0.300	24 unit	890.83 2.000	24 unit	900.83 2.000	24 unit	910.83 2.000	24 unit	3.533.49 6.300	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	n/a	100%	1.386.5 10.000	6 paket	1.414.1 09.400	6 paket	1.433.7 40.000	6 paket	1.533.7 40.000	6 paket	1.633.7 40.000	24 paket	6.015.32 9.400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	100%	1.041.7 25.000	8 unit	1.642.6 13.500	8 unit	1.309.0 00.000	8 unit	1.359.0 00.000	8 unit	1.409.0 00.000	8 unit	5.719.61 3.500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023-2026 bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian tujuan dan sasaran instansi sekaligus mendukung dan mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Pemda DIY. Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD tahun 2023-2026 ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 12. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang Mengacu pada RPD 2023-2026

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Keterangan
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1.	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan.	n/a	100	100	100	100	100	Sesuai RPD
2.	Optimalisasi Barang Milik Daerah	6.967.568.518	9.016.589.475	9.378.609.475	9.703.109.475	10.003.409.475	10.003.409.475	Sesuai RPD

Secara umum yang dimaksud dengan transparansi yaitu memberikan informasi terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan. Sedangkan definisi transparan menurut Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (1) yaitu yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara Adapun akuntabilitas dimaknai sebagai pengendalian sumberdaya pelaksanaan kebijakan untuk pencapaian tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan dalam Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (5), akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat .

BAB VIII. PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah BPKA DIY merupakan produk perencanaan 4 (empat) tahunan yang harus diterjemahkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah BPKA DIY. RENSTRA ini harus berkorelasi dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY Tahun 2023-2026 dan terintegrasi, serta selaras pula dengan produk perencanaan pembangunan lainnya baik dalam perencanaan maupun implementasinya.

RENSTRA Perangkat Daerah BPKA DIY Tahun 2023 - 2026 merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKA DIY untuk lima tahun ke depan. Di dalam RENSTRA ini tercantum tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman kinerja BPKA DIY.

Tentunya, untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien, diperlukan adanya komitmen dan dukungan dari keseluruhan pimpinan dan staf yang ada guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan mengedepankan transparansi, dan akuntabilitas guna mendukung terwujudnya misi Pemerintah Daerah DIY.

Rencana Strategis

2023-2026



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Komplek Kepatihan Danurejan
Yogyakarta